

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL KOTA BUKITTINGGI

Chairunnisa¹, Rani Manik², M. Azurul Azwar³, Puty Andiny⁴, Safuridar⁵, Yani Rizal⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Samudra Langsa, Aceh, Indonesia
Email Korespondensi: chairunnisaa59@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure in Bukittinggi City. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Bukittinggi City, covering the observation period from 2013 to 2024. The research method employed is a quantitative approach using multiple linear regression analysis. Data processing was carried out using the EViews application to examine the relationship and influence of each independent variable on the dependent variable. The results of the study indicate that Local Own-Source Revenue has a positive and significant effect on Capital Expenditure in Bukittinggi City. In addition, the General Allocation Fund is also proven to have a positive and significant effect on Capital Expenditure. These findings suggest that the higher the PAD and DAU received by the local government, the greater the allocation of capital expenditure to support regional development. Furthermore, the Special Allocation Fund also shows a positive and significant effect on Capital Expenditure. This confirms that these three sources of regional revenue play an important role in increasing capital expenditure in Bukittinggi City.

Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocarion Fund, Capital Expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota Bukittinggi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi dengan periode pengamatan selama tahun 2013 hingga 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan dan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Bukittinggi. Selain itu, Dana Alokasi Umum juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD dan DAU yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi belanja modal yang dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menegaskan bahwa ketiga sumber pendapatan daerah tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan belanja modal di Kota Bukittinggi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pelaksanaan otonomi di daerah indonesia. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan program otonomi agar melaksanakan pelayanan publik disegala bidang dan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Program tersebut bertujuan untuk lebih mendedikasikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan mempermudah masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dimana dalam konteks kota/kabupaten dikota bukittinggi. Yang di mana pemerintah daerah di indonesia, sebagai badan otonom yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dan administrasi di tingkat lokal, diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya keuangannya secara efektif dan juga secara efisien. Pendapatan asli daerah (pad) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (retno dan widiatmoko, 2019).

Kondisi ini yang akan menjadi lebih dapat memprihatinkan pada daerah yang dimana terlihat tingkat pendapatan asli daerah (pad) nya masih dikatakan rendah. Pad yang telah menjadi rendah berarti ketergantungan pada pemerintah pusat (dan atau pemerintah provinsi) akan menjadi lebih tinggi. Anggaran daerah ini juga merupakan salah satu rencana keuangan yang dimana akan menjadi dasar dalam pelayanan terhadap publik. Di indonesia, terlihat dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Apbd pada hakekatnya juga merupakan instrumen kebijakan yang telah dipakai oleh negeri sebagai alat bantu untuk meningkatkan suatu pelayanan terhadap masyarakat umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat di daerah tersebut.

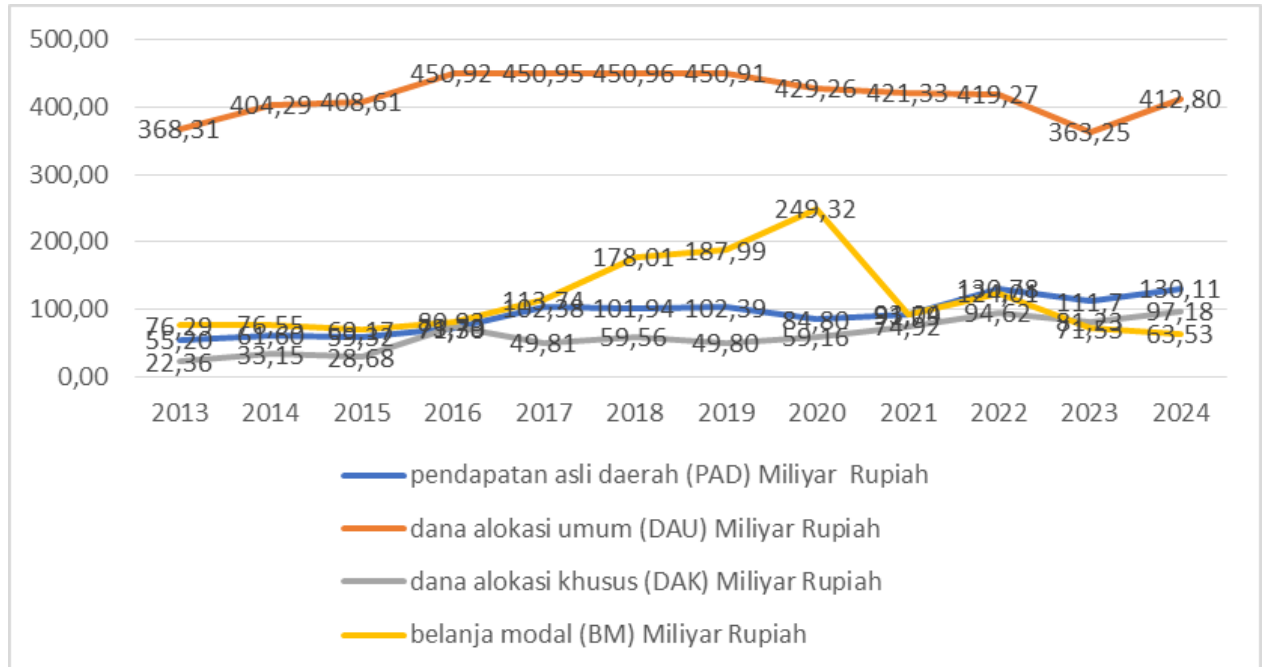
Salah satu bentuk dari sumber daya keuangan ini adalah pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan dana alokasi khusus (dak), yang merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan di tingkat lokal. Belanja modal memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Maka oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana pengaruh pad, dau, dan dak terhadap belanja modal di tingkat kota/kabupaten ini guna untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mampu mengatur pendapatan suatu daerah yang didapat untuk belanja-belanja yang bersifat produktif. Perekonomian daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah. Di indonesia, pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) memainkan peran krusial dalam mendukung belanja modal daerah, termasuk di kota bukittinggi.

Belanja daerah merupakan bentuk pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum (abbas et al., 2021). Belanja modal dialokasikan berdasar pada kebutuhan atas sarana serta prasarana suatu daerah. Baik sarana dan prasarana itu untuk tujuan pelaksanaan tugas yang lancar bagi pemerintah atau bahkan untuk fasilitas publik (muhammad fahmi & hairani, 2019).

Kota bukittinggi yang dikenal sebagai salah satu kota wisata, memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut diperlukan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk dalam penggunaan pad, dau, dan dak. Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas fiskal kota untuk membiayai berbagai program pembangunan. Di sisi lain, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat merupakan sumber dana penting untuk mendukung belanja modal dan pembangunan infrastruktur. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari anggaran apbd yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan

pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Di Kota Bukittinggi Tahun 2013-2024

Dapat dilihat dari grafik diatas dengan garis berwarna biru bahwa perkembangan pendapatan asli daerah (pad) kota bukittinngi menunjukan hasil yang berbeda beda. Misalnya pada tahun 2013 pad berjumlah 55,20 miliar, lalu pada tahun 2014 mengalami kenaikan 61,60 miliar hal ini disebabkan dari peroleh pemungutan pajak di bukittinggi, lalu pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 59,32 miliar hal ini di sebabkan pemungutan pajak yang menurun, pada tahun 2016 pad mengalami peningkatan sebesar 71,30 miliar yang diikuti dengan tahun berikut nya pada pad yang masih menurun dan meningkatnya pemungutan pajak di kota bukittinggi, tahun 2017 pad meningkat sebesar 102,38 miliar, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 101,94, pada tahun 2019 meningkat lagi sebesar 102,39, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan pad yang sebesar 91,79, dan pada 2022 pad mengalami peningkatan yang cukup dratis yaitu sebesar 130,78 yang ini menunjukan pemungutan pajak yang mulai stabil.

Pada grafik garis berwarna merah bahwa perkembangan dana alokasi umum (dau) pemerintah kota bukittinggi meningkat dan menurun setiap tahunnya, pada 2013 dau berjumlah 368,31 miliar, pada tahun 2014 dau mengalami peningkatan sebesar 404,29 miliar, pada tahun 2015 dau mengalami peningkatan sebesar 408,61 miliar, pada tahun 2016 dau mengalami peningkatan sebesar 450,92 miliar, pada tahun 2017 dau mengalami peningkatan sebesar 450,95 miliar, pada tahun 2018 dau mengalami peningkatan sebesar 450,96 miliar hal ini dau mengalami pergerakan flukstasi, pada tahun 2019 dau mengalami penurunan sebesar 450,91 miliar, pada tahun 2020 dau mengalami penurunan sebesar 429,26 miliar, pada tahun 2021 dau mengalami penurunan sebesar 421,33 miliar, pada tahun 2022

dau mengalami penurunan sebesar 419,27 miliar, hal ini terjadi di karenakan jumlah dau cenderung ditunjukan untuk kebutuhan daerah yang di desentralisasi dalam memperoleh dari pengelokasian pendapatan apbn.

Pada grafik garis berwarna hijau bahwa perkembangan dana alokasi khusus (dak) pemerintah kota bukittinggi mengalami realisasi dan fluktuasi meningkat dan menurun selama sepuluh tahun terakhir, pada data tersebut dapat di simpulkan bahwa dak di tahun 2013 sebesar 22,36 miliar, lalu pada tahun 2014 meningkat sebesar 33,15 miliar, pada tahun 2015 dak mengalami penurunan sebesar 28,86 miliar, lalu pada tahun 2016 meningkat sebesar 73,73 miliar, lalu pada tahun 2017 menurun sebesar 49,81 miliar, lalu pada tahun 2018 meningkat sebesar 59,56 miliar, lalu pada tahun 2019 menurun sebesar 49,80 miliar, lalu pada tahun 2020 meningkat sebesar 59,16 miliar, lalu pada tahun 2021 meningkat sebesar 74,92 miliar, dan diikuti pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 94,62 miliar.

Pada grafik di atas garis berwarna ungu bahwa belanja modal di kota bukittinggi pada tahun 2013 kota bukittinggi membelanjakan 55,20 miliar belanja modal dari akumulasi APBD dan terus cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2015 yaitu sebesar 61,60 miliar hal tersebut dapat menggambarkan pemerintah kota bukittinggi belum memanfaatkan dengan maksimal aliran dari pendapatan daerahnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui penganggaran belanja modal yang cukup pada tahun 2016 yaitu 71,30 miliar meningkat belanja modal sampai 2022 yaitu sebesar 130,78 miliar dari akumulasi APBD, hal tersebut dapat di lihat dari grafik di atas pemerintah kota bukittinggi memaksimalkan aliran dari pendapatan daerah upaya meningkatkan pelayanan publik melalui anggaran belanja modal.

Berdasarkan daei latar belakang masalah, tujuan penelitian ini tertarik untuk meneliti tentang “pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal di kota bukittingi, mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum (dau) terhadap belanja modal di kota bukittingi, dan mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal di kota bukittingi, secara individu maupun bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah “pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal di kota bukittinggi tahun 2013 – 2024”.

LITERATUR REVIEW

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dimana memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud (kementrian keuangan). Menurut Erlina dan Rasdianto (2017:31) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi menurut Mursyidi (2018:305) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal juga dapat disebut sebagai jenis pengeluaran pemerintah yang dimana dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap ataupun aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang, biasanya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Pengeluaran ini mencakup pembelian tanah, pembangunan gedung dan bangunan, pengadaan peralatan, serta perolehan aset tidak berwujud seperti perangkat lunak atau hak paten. Tujuan utama belanja modal adalah untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Menurut (UU no.32 tahun 2004) belanja modal merupakan pembelanjaan yang diprioritaskan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam rangka pemenuhan tugas daerah, di dalamnya disebutkan hal yang terkait dengan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, serta pengembangan jaminan sosial. Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (halim, 2007 dalam badrudin, 2017). Menurut mursyidi (2018:305) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merujuk pada pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan perbaikan sarana ekonomi. Pengeluaran ini bertujuan meningkatkan kapasitas produktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu (R. Paudel, 2023).

Jenis-Jenis Belanja Modal

Standar akuntansi pemerintahan (sap) diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 mengklasifikasikan belanja modal ke dalam lima kategori utama:

1. Belanja modal tanah belanja modal tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja modal gedung dan bangunan belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan
5. Belanja modal tetap/fisik lainnya belanja modal tetap/fisik lainnya merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan, perbaikan.

Pendapatan Asli Daerah

Merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya itu sendiri seperti pajak, retribusi, hasil usaha daerah, dan lain-lain. Yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari pungutan berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah (kurniawati & muzdalifah, 2022). Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam

mengelola pendapatan asli daerah (pad). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengumpulkan dana guna untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Beberapa komponen pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). (hafandi & romandhon, 2020) apbd. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwa struktur apbd memiliki struktur satu kesatuan yang terdiri dari (1) belanja daerah, (2) pendapatan daerah, (3) pembiayaan daerah. (Citra & Kurnia, 2024).

Pengertian Anggaran

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan uu no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan instrument ekonomi. Anggaran juga didefinisikan sebagai sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu lembaga tertentu untuk kurun waktu tertentu (dimasa yang akan datang). Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya juga dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Citra & Kurnia, 2024).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd)

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam apbd. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas tugas desentralisasi. Menurut halim (2014) apbd merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran maksimum dalam periode satu tahun untuk mendanai kegiatan serta program daerah. Apbd merupakan rencana keuangan dasar penyelenggaraan pelayanan publik.

Dana Alokasi Umum (Dau)

Dana alokasi umum merupakan penerimaan dari apbn yang telah disalurkan kepada daerah sehingga kemampuan keuangannya kurang lebih sama untuk keperluan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan desentralisasi, sebagaimana diamanatkan 13 oleh uu no. 33 tahun 2004. Dana alokasi umum juga merupakan bantuan dana dari pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat membantu pemerataan pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar pada masyarakat di tiap wilayah. Christia & ispriyarso (2019) mengungkapkan bahwa dau atau dana alokasi umum merupakan instrumen desentralisasi fiskal untuk pemerataan fiskal. Sebagai bagian dari proses desentralisasi, pemerintah pusat mengirimkan pendanaan kepada pemerintah daerah dari apbn untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya tumbuh dan berkembang, pendanaan ini berasal dari dau. Dau ditetapkan sendiri oleh daerah. Dana alokasi umum (dau) merupakan dana yang bersumber dari apbn yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (retno dan widiatmoko, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh rahman (2022), pemanfaatan dau kelurahan secara garis besar masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pelimpahan kewenangan (desentralisasi) yang diberikan kepada lurah, sehingga ruang gerak lurah masih sangat terbatas. Sebaliknya, daerah

yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi dan relative besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi dan sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (badrudin, 2017).

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari apbn, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun pengalokasian dan antara lain:

1. Dan dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Besaran dan ditetapkan sekurang-sekurangnya 26% dari total pendapatan dalam negeri (pdn) netto yang ditetapkan dalam apbd.
3. Proporsi dan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari apbn ke daerah tertentu untuk dapat mendanai kebutuhan khusus yang dimana merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain yaitu : kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll. Dana alokasi khusus (dak) adalah bagian dari anggaran negara yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan spesifik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sekaligus juga untuk mendukung program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang diperoleh atau bersumber dari pendapatan apbn yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang memiliki tujuan untuk membantu pendanaan pada kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam pemberian dana alokasi khusus.

Menurut suhardi (2018) dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil Pajak (Dbhp)

Dana bagi hasil berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21. Penetapan alokasi pajak ditetapkan oleh menteri keuangan. Dbh pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan asosiatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data dari badan pusat statistik (bps) kota bukittinggi yang meliputi data pendapatan asli daerah, dan, dak dan belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, artinya menggunakan data tahun 2013 hingga tahun 2024. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode analisis jalur (*path analysis method*) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen antara lain pendapatan asli daerah, dan, dak dan belanja modal di kota bukittinggi. Model *path analysis* pengaruh pendapatan asli daerah, dan, dak dan belanja modal di kota bukittinggi. Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian:

$$Y=C + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + E$$

Keterangan:

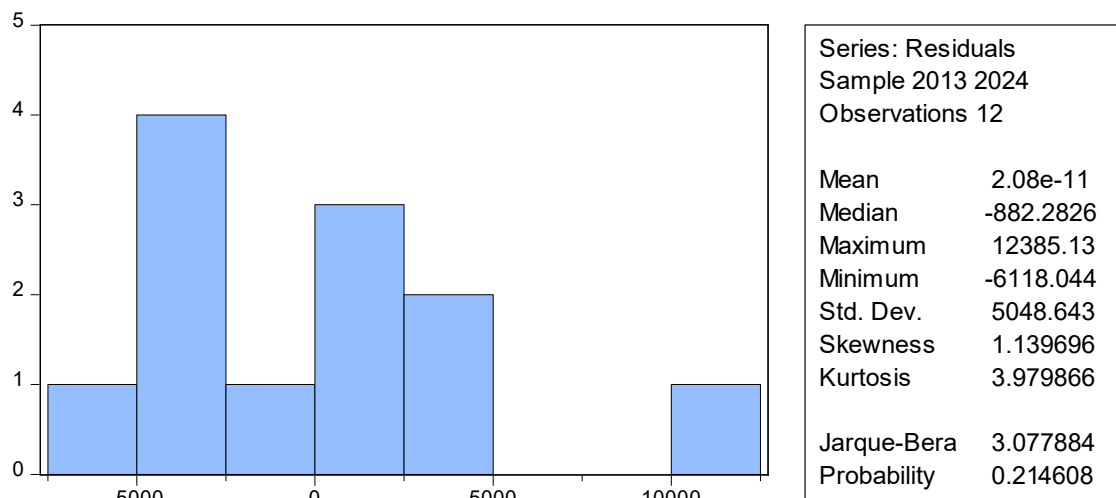
Y = Belanja Modal
 C = Konstanta
 B₁, B₂, B₃ = Koefisien Regresi
 X₁ = Pendapatan Asli Daerah
 X₂ = Dana Alokasi Umum
 X₃ = Dana Alokasi Khusus
 E = Error

Dalam analisis jalur ini, kita bisa mengidentifikasi pengaruh langsung, dan pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Namun, sebelum melakukan pengujian ini, kita perlu lebih dulu menggunakan uji analisis klasik terlebih dahulu. Uji analisis klasik ini penting untuk memastikan bahwa hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini bertujuan agar dapat digunakan sebagai alat estimasi yang sah, yang hanya bisa diterapkan jika telah memenuhi syarat blue (*best linear unbiased estimator*), yaitu tidak adanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2.
Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas residual menggunakan *jarque-bera test*, diketahui bahwa nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh sebesar 0,214608, yang mana nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Artinya, model regresi telah memenuhi asumsi klasik normalitas dan residual tidak menunjukkan adanya penyimpangan dari distribusi normal, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/10/25 Time: 13:39			
Sample: 2013 2024			
Included observations: 12			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	8.78E+08	300.4555	NA
X1	0.558359	15.38594	2.035625
X2	0.589457	356.4549	1.720546
X3	0.645430	9.295360	1.246524

Gambar 3.
Uji Multikoinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan nilai (vif), diperoleh bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai centered vif sebagai berikut: variabel x1 sebesar 2,035625, variabel x2 sebesar 1,720546, dan variabel x3 sebesar 1,246524. Nilai ini >10.00, yang merupakan batas toleransi keberadaan multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi, sehingga masing-masing variabel dapat digunakan untuk menjelaskan variabel dependen.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-Statistic	0.567750	Prob. F(9,2)	0.7738
Obs*R-Squared	8.624352	Prob. Chi-Square(9)	0.4726
Scaled Explained Ss	5.710982	Prob. Chi-Square(9)	0.7685

Gambar 4.
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan white heteroskedasticity test, diperoleh nilai *prob. Chi-square* sebesar 0,4726, yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Selain itu, nilai *prob. F-statistic* juga menunjukkan angka 0,7738, yang kembali lebih besar dari 0,05. Karena nilai probabilitas pada masing-masing indikator uji lebih besar daripada 0,05, maka h_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual bersifat homogen dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation Lm Test:			
F-Statistic	0.299578	Prob. F(2,6)	0.7516
Obs*R-Squared	1.089513	Prob. Chi-Square(2)	0.5800

Gambar 4.
Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan *breusch-godfrey serial correlation lm* test, diperoleh nilai *prob. Chi-square* sebesar 0,5800 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$). Nilai *prob. F-statistic* juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebesar 0,7516, yang lebih tinggi dari 0,05. Karena nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Hasil Analisis Jalur Secara Langsung Pengaruh Secara Langsung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Di Bukittinggi: Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan asli daerah (PAD) berfungsi sebagai indikator utama kapasitas fiskal daerah yang mampu mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pad memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal di bukittinggi, meskipun pengaruh tersebut belum sepenuhnya signifikan, menandakan bahwa peningkatan pad cenderung mendorong peningkatan belanja modal. Namun, kontribusi pad terhadap belanja modal masih terbatas karena sebagian besar dana pembangunan masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Di sisi lain, pad terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bukittinggi. Artinya, peningkatan pad dapat memperkuat aktivitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengaruh tidak langsung pad terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal juga menunjukkan hasil yang positif, menunjukkan bahwa pad tetap menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di bukittinggi, meskipun pengaruhnya terhadap belanja modal belum sepenuhnya dominan.

Dana Alokasi Umum (Dau) Merupakan Salah Satu Sumber Utama Pendanaan Yang Mendukung Pembangunan Daerah, Termasuk Dalam Pembiayaan Belanja Modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di bukittinggi, yang berarti peningkatan dana dari pusat ini secara langsung mendorong peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, dau juga terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi bukittinggi, menunjukkan bahwa dana ini tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah tetapi juga berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, keberadaan dau sangat penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah bukittinggi.

Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Di Bukittinggi: Pengaruh Dak Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi khusus (DAK) berfungsi sebagai sumber dana tambahan yang diperuntukkan untuk mendukung program pembangunan tertentu, termasuk belanja modal di bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di bukittinggi, yang menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dak secara langsung meningkatkan realisasi dan volume pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, dak juga terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi bukittinggi, menandakan bahwa dana ini berkontribusi signifikan dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui penguatan sektor infrastruktur dan pelayanan dasar.

SIMPULAN

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (dau), dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh penting terhadap belanja modal kota bukittinggi tahun 2013-2024. Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi meski fluktuatif, dau menjadi sumber pendanaan yang relatif stabil, sedangkan dana alokasi khusus (dak) berperan signifikan dalam sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Secara simultan, ketiganya berkontribusi positif terhadap peningkatan belanja modal daerah. Pemerintah kota bukittinggi perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (pad) dan memprioritaskan belanja modal pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah pusat diharapkan menyesuaikan alokasi dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi khusus (dak) sesuai kebutuhan riil daerah.

REFERENSI

- Badrudin, Rudy. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah* (Edisi Kedua). Yogyakarta : Upp Stim Ykpn
- Citra, Y., & Kurnia, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset* <http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/5831akuntansi>.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Erlina, Rambe, O.S., Dan Rusdianto. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2018. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh Pad Dan Dau Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 16–28.
- Retno, Nadiah Dwi Dan Widiatmoko, Jacobus. 2019. Pad, Dau, Dak, Dbh, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*. Vol. 8 No 1
- Fahmi M, . H. Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *J Media Wahana Ekon*. 2019;16(1):40. Doi:10.31851/Jmwe.V16i1.3407.
- Suhardi, D. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Konomi Kota Parepare.

Economos: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 31–43.
<https://doi.org/10.31850/Economos.V1i2.574>.